

EVALUASI KEBIJAKAN PENGURANGAN PEKERJA ANAK PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUMENEP

Oleh :

Drs. H. Moh. Said, M.Si*

E-mail : hm_said@yahoo.ac.id

A. PENDAHULUAN

Percepatan pembangunan nasional oleh pemerintah ditunjukkan dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berbasis penciptaan perluasan kesempatan kerja yang fleksibel (lentur), melalui pemberdayaan sektor pertanian, industri rumah tangga kecil dan menengah, serta sektor informal, dan peningkatan kerjasama antar daerah baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Terjadinya globalisasi ekonomi pada saat sekarang ini membalikkan fakta atas terjadi krisis secara keseluruhan yang terjadi di masyarakat. Terciptanya daya beli masyarakat semakin cenderung menurun, yang disebabkan terpuruknya kondisi ekonomi bangsa dan laju inflasi keuangan yang tinggi menyebabkan tidak stabilnya perekonomian, maupun terjadinya keadaan suhu politik yang tidak menentu karena banyaknya elit politik bertikai dalam mempertahankan kedudukan dan sibuk dengan sendirinya.

Masalah pengangguran sungguh merupakan masalah yang sangat rumit, karena jenisnya beraneka ragam dan implikasinya yang bersifat multifaset, yang pemecahannya menuntut pendekatan multifungsional dan lintas sektoral. Pengangguran tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang namun juga dialami oleh negara-negara maju. Namun masalah pengangguran di negara-negara maju jauh lebih mudah terselesaikan daripada di negara-negara berkembang karena hanya berkaitan dengan pasang surutnya perekonomian dan bukannya karena faktor kelangkaan investasi, masalah ledakan penduduk, ataupun masalah sosial politik. Tingginya angka pengangguran, masalah ledakan penduduk, distribusi pendapatan yang tidak merata, dan berbagai permasalahan lainnya di negara kita menjadi salah satu faktor utama rendahnya taraf hidup para penduduk di negara kita. Namun yang menjadi penyebab utama sekaligus faktor penyebab rendahnya taraf hidup di negara-negara berkembang adalah terbatasnya penyerapan sumber daya, termasuk sumber daya manusia yang kurang profesional dalam menata kehidupannya.

Secara konstitusional, permasalahan dimaksud telah dijadikan perhatian utama bagi bangsa Indonesia sejak tersusunnya Undang - Undang Dasar 1945. Kemiskinan merupakan masalah bangsa yang sampai saat ini belum terselesaikan dan masih menggelinding menebar kesakitan penderitaan rakyat. Kebijakan pemerintah pun terasa *trial and error* dalam menanggulangnya, sehingga tidak ada satu titikpun yang bisa menghapus penderitaan ini akan surutnya deretan angka kemiskinan di bumi ini. Pengangguran juga identik dengan kebodohan, kejahatan dan perilaku menyimpang lainnya. Indikator masalah sosial ini bisa dilihat dari begitu banyaknya anak-anak yang orang tuanya menganggur, yang mulai turun ke jalan. Pembangunan bangsa Indonesia kedepan sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sehat fisik dan mental serta mempunyai ketrampilan dan keahlian kerja, sehingga mampu membangun keluarga yang bersangkutan untuk mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan layak, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup, kesehatan dan pendidikan anggota keluarganya.

* Dosen FISIP Universitas Wiraraja Sumenep

Dalam mengurangi angka pengangguran dan memperbanyak kesempatan kerja, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah mendorong perkembangan wirausaha produktif di Indonesia. Apalagi kesempatan kerja dengan berwirausaha di berbagai bidang ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh semua lulusan jenjang pendidikan mulai dari SD sampai lulusan universitas/ perguruan tinggi. Wirausaha merupakan salah satu solusi untuk menekan tingkat pengangguran, terutama lulusan SD yang jumlahnya masih cukup besar di Indonesia.

Upaya pemerintah dalam menekan pengangguran dan mengurangi pekerja anak yang saat ini banyak terjadi karena adanya himpitan ekonomi keluarga, maka dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 - 2014 menetapkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai Pelaksana Tugas Komite Nasional Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (KANPBPTA) untuk melaksanakan kegiatan Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH). Kegiatan ini dirancang sebagai kegiatan bersinergi dengan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengembalikan anak yang bekerja dan tidak sekolah untuk kembali ke pendidikan. PPA-PKH ini merupakan suatu model dan upaya penghapusan bentuk bentuk pekerjaan teburuk anak, sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN-PBPTA).

Program pengurangan pekerjaan anak untuk mendukung program keluarga harapan (PPA-PKH), dengan Sasaran utama kegiatan ini diarahkan pada anak bekerja dan putus sekolah yang berasal Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan berusia 7- 15 tahun. Tujuan program PPA-PKH untuk menarik anak-anak yang terpaksa bekerja, padahal seharusnya masih mengenyam pendidikan. Mereka terpaksa bekerja karena ketidakmampuan ekonomi keluarganya. Melalui program yang digulirkan, Pemerintah menaruh perhatian kepada anak-anak putus sekolah agar mereka mau kembali ke bangku sekolah. Indikator keberhasilan kegiatan tersebut adalah berkurangnya jumlah pekerja anak terutama yang berkerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang akhirnya satu demi satu pekerja anak dapat kembali ke dunia pendidikan. Program ini diharapkan mempercepat proses penarikan para pekerja anak terutama dari pekerjaan-pekerjaan terburuk dan berbahaya seperti perbudakan, pelacuran, pornografi dan perjudian, pelibatan pada Narkoba, dan pekerjaan berbahaya lainnya. Indonesia menargetkan akan bebas dari pekerja anak pada tahun 2020.

Program penarikan pekerja anak ini dilaksanakan agar anak-anak Indonesia dapat mengembangkan kesempatan belajar di sekolah dan terbebaskan dari berbagai bentuk pekerjaan terburuk Pekerja anak-anak yang seharusnya masih mengenyam pendidikan itu telah di berikan bimbingan dan pendidikan selama 30 hari oleh para pendamping dan tutor yang memiliki keahlian dalam memotivasi anak Adanya Pengurangan Keperja Anak Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) ini diharapkan nantinya tidak hanya mengurangi jumlah warga miskin saja tetapi juga dapat meningkatkan kualitas kehidupannya serta kesejahteraannya, sekolahnya bisa terfasilitasi, sisi kesehatannya juga diperhatikan secara baik.

Permasalahan pekerja anak ini, secara umum dipengaruhi oleh faktor kemiskinan budaya dan keterbatasan akses pendidikan, serta adanya reterdasi mental anak karena kurangnya kasih sayang orang tua karena keadaan ekonomi orang tua yang kurang mammpu, sehingga anak membantu orang tua dalam menghadapi kebutuhan hidupnya guna memenuhi kesejahteraannya.

Dalam pengembangan PPA-PKH pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota penerima manfaat dalam menjaga kesinambungan anak di pendidikan terus meningkat dalam bentuk penyiapan bea siswa maupun transportasi untuk anak. Sebagai upaya untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan sektor ketenagakerjaan, pemerintah daerah dan instansi pembina sektor terkait

Kabupaten Sumenep tingkat pekerja anak yang dinilai cukup banyak 150 orang yang terdata (Disnakertrans, Kabupaten Sumenep, 2012). Dalam mengantisipasi adanya

ledakan pengangguran, dan pekerja anak Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam mengatasi adanya hal tersebut, telah melakukan berbagai upaya dalam mengurangi hal tersebut, melalui program kegiatan kembali ke pendidikan yang mengedepankan penciptaan dan kesempatan belajar di bangku sekolah yang bersifat formal yang dapat memberdayakan masa anak dengan berlandaskan kepada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) Tahun 2013;

Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumenep dalam kegiatan programnya menyelenggarakan Pengurangan Pekerja Anak yang bersinergi dengan Program Keluarga harapan (PPA-PKH). Prinsipnya bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah menarik anak dari tempat kerja yang berasal dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang bekerja dan putus sekolah untuk dikembalikan ke satuan pendidikan melalui pemberian pendampingan di shelter (tempat kegiatan yang memfasilitasi anak untuk memotivasi dan mempersiapkan anak agar kembali ke pendidikan).

Kenyataan yang ada setelah anak mendapat bimbingan dan motivasi, terkadang tidak kembali ke pendidikan dan kembali lagi untuk bekerja untuk menghidupi kembali dirinya dan keluarganya. Berkaitan dengan kompleksitas permasalahan diatas, maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul : “Evaluasi Kebijakan Pengurangan Pekerja Anak Program Keluarga Harapan Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sumenep”.

Uraian masalah diatas, mengisyaratkan bahwa langkah awal dalam penanganan pengurangan pekerja anak perlu diidentifikasi potensi yang mereka miliki, karena pemberdayaan anak untuk kembali ke pendidikan merupakan suatu proses peningkatan kondisi kehidupan dan penghidupan yang ditujukan kepada anak usia 7 – 15 tahun.

Pengurangan pekerja anak dalam mengatasi pengangguran memerlukan kajian menyeluruh (*comprehensif*), sehingga dapat dijadikan acuan dalam merancang program pembangunan kesejahteraan sosial yang lebih menekankan pada konsep pertolongan dan bantuan agar berdaya guna. Oleh karena itu pekerja anak memerlukan pertolongan dan perhatian dari pemerintah untuk mengurangi beban ekonominya salah satunya melalui pembinaan, pemanduan dan bimbingan berwira usaha baru dalam mencapai derajat kehidupan yang layak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Bagaimanakah Evaluasi Kebijakan Pengurangan Pekerja Anak Program Keluarga Harapan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumenep?”

B. METODE PENELITIAN

1. Fokus Penelitian

Pengurangan Pekerja Anak Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) dapat dilihat dari aspek kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumenep, mengupayakan untuk lebih meningkatkan pengembalian anak pekerja kembali ke dunia pendidikan yang layak pada usianya.

Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, pada hakekatnya yang menjadi fokus penelitian kegiatan PPA-PKH yang telah dilaksanakan, berdasarkan Farida Yusuf, (2000 : 84) yaitu :

1) Indikator masukan (*input*),

- 2) Proses (*process*),
- 3) Keluaran (*output*),
- 4) Indikator dampak atau (*outcame*).

2. Sumber Data

a. Data Primer

Yakni diperoleh dari wawancara langsung dengan para pejabat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumenep yang mempunyai tanggung jawab untuk mengelola pemberitaan yaitu : 1) Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja 2) Kasie Pembinaan Organisasi Kerja, 3) Kasie Persyaratan Kerja dan 4) Kasie Pemberdayaan dan Hubungan Industrial.

b. Data Sekunder

Diperoleh dari faktor internal yaitu data-data dokumentasi serta berkas berkas baik visual ataupun dokumen kerja dari pelaksanaan penertiban pemberitaan yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumenep. Data ini dapat mendukung hasil penelitian terhadap evaluasi PPA-PKH, sehingga penelitian akhirnya menjadi valid dan dapat dibuktikan dengan kajian ilmiah dalam penelitian.

3. Informan

- | | | |
|-----------------------|--------------------------------|------------|
| 1) Informan Kunci | : Kepala Dinas Disnakertrans | : 1 orang |
| 2) Informan Utama | : Kepala Bidang, Kasi dan Staf | : 5 orang |
| 3) Informan Pendukung | : Pendamping | : 2 orang |
| | Peserta Pendidikan | : 10 orang |

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara teknik pengumpulan data dengan masalah yang ingin dipecahkan. (Nazir, 2008 : 211).

a. Interview

Yaitu memperoleh data dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan informan yang ada kaitannya dengan penelitian, agar hasil penelitian lebih akurat. Menurut Nazir (1988 : 234), mengatakan bahwa : Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat dinamakan *interview guide*.

Wawancara merupakan alat pengumpulan informasi yang langsung tentang beberapa jenis data sosial baik terpendam maupun kelihatan. Dalam hal ini pengumpulan data melalui tanya jawab.

b. Observasi

Observasi adalah suatu pengamatan yang khusus dan pencatatan yang sistematis ditujukan kepada suatu atau beberapa paket masalah dalam rangka penelitian dengan maksud untuk pemecahan masalah yang dihadapi. (Asyari (2001 : 82),

Melalui teknik ini, peneliti mengamati langsung kondisi dan keadaan serta mencatat setiap permasalahan yang terjadi, sehingga dari hasil ini penulis dapat membuat analisa dari penelitian yang diteliti.

c. Dokumentasi.

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Arikunto (2008 : 206). Peneliti berusaha mengumpulkan data dari dokumen-dokumen dan catatan-catatan dalam bentuk apapun.

5. Teknik Analisa Data

a. Pengolahan Data

Untuk memperoleh data yang obyektif, valid (menggambarkan apa yang sebenarnya dan reliabel dapat dipercaya), maka penulis menggunakan pengolahan data yang secara garis besarnya menurut Arikunto, 2004 : 240, meliputi dua langkah, yaitu sebagai berikut :

1) Editing,

Editing merupakan hasil koreksi atau melakukan pengecekan kembali terhadap catatan hasil penelitian yang telah dilakukan agar tidak menimbulkan kesalahan dalam mengadakan evaluasi dari penelitiannya.

2) Coding,

Coding merupakan cara yang dilakukan penulis dengan jalan mengklasifikasikan jawaban informan dan memberi kode pada masing masing jawaban, hal ini sebagai bahan bantu dalam meng-urutkan kode.

b. Analisa Data

Teknik Analisis merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, sebab melalui analisa data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. (Nazir, 2008 : 405).

Adapun teknik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik Sugiyono (2010 : 245), yaitu :

1) Analisis Data Sebelum Di Lapangan

Analisis data sebelum di lapangan peneliti menggunakan data sekunder yaitu dari masyarakat dan pengikut bimbingan, literatur, dokumen dan arsip dinas tenaga kerja yang akan menentukan fokus penelitian PPA-PKH

2) Analisis Data Di Lapangan

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dalam pelaksanaan PPA-PKH dalam memberikan bimbingan pada anak pekerja.

Analisis data di lapangan peneliti menggunakan model interaktif dengan informan, yaitu :

- a) Reduksi Data, yaitu merangkum data dan memilih hal – hal yang dianggap pokok dengan kinerja pegawai yang sesuai fokus penelitian,
- b) Penyajian Data, dilakukan dengan uraian singkat dari hasil interview dalam bentuk naratif, atas pelaksanaan PPA-PKH
- c) Verifikasi, menjawab permasalahan yang sesuai dengan rumusan masalah sejak awal yang kemudian ditarik menjadi kesimpulan dari kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan.

3) Analisis Data Setelah Di Lapangan

Analisis data dalam penelitian ini berdasarkan tahapan-tahapan yang dilalui

- a) Dimulai dengan mengadakan analisis domain (gambaran umum pelaksanaan PPA-PKH),
- b) Mengadakan analisis taksonomi (dijabarkan dengan mengetahui struktur internal dan eksternal pelaksanaan PPA-PKH),
- c) Memberikan evaluasi dari hasil pelaksanaan PPA-PKH, kemudian ditarik kesimpulan, selanjutnya memberikan saran dari hasil penelitian sebelum dan selama dilapangan. Dalam menguji keabsahan data dari penelitian ini, maka data yang sudah diperoleh, keseluruhan proses dari penelitian agar tidak terjadi kesalahan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jika sejak usia dini anak sudah dibiasakan bekerja dikawatirkan mereka akan tumbuh menjadi remaja yang nakal. Remaja yang pada masa kecilnya tidak memiliki waktu bermain rentan terlibat dalam kenakalan seperti perkelahian, kabur dari rumah, merokok, bahkan terpapar kebiasaan minum minuman keras dan memakai obat-obatan terlarang. Padahal dalam usia dini anak-anak harus bersekolah sebagai bekal kehidupannya dimasa datang yang lebih matang.

Praktek pekerja anak yang berdampak negatif terhadap masa kanak-kanak dan remaja seseorang merupakan dampak dari kemiskinan dan faktor internal keluarga yang mengeksploitasi anaknya.

Penyebab terjadinya pekerja anak antara lain adalah kemiskinan dan gagalnya sistem pendidikan. Hal ini menjadikan anak-anak banyak masuk kedalam sektor-sektor perekonomian baik yang formal maupun yang informal. Dalam sektor ekonomi informal pekerja anak meliputi beragam kegiatan dan kebanyakan terjadi di jalanan, misalnya menjadi pedagang asongan, menyemir sepatu, mengemis, dll. Pekerjaan di jalanan ini banyak dilakukan oleh anak-anak dianggap sebagai cara yang paling mudah untuk mendapatkan uang dengan cara mandiri. Dalam rangka mewujudkan penghapusan pekerja anak, semua elemen masyarakat harus terlibat termasuk serikat pekerja/serikat buruh. Oleh karena itu diperlukan perencanaan dalam menyusun kebijakan yang tepat dan efektif agar pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara terarah.

1. Indikator masukan (input),

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJKN) 2010 – 2014 telah menetapkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk melaksanakan kegiatan Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH). Sebagai tindak lanjut, dikeluarkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (KAN-PBPTA) dan Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (RAN-PBPTA)”.
Formulasi kebijakan yang telah final ditinjau dari beberapa aspek, sebenarnya merupakan Program Pusat yaitu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang pelaksanaannya diserahkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumenep.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, diundang Pemerintah Pusat membahas tentang Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (KAN-PBPTA) dan Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (RAN-PBPTA). Khusus Pekerja Anak terpukul di Kabupaten Sumenep dalam Tahun 2009-2013 tercatat 393 orang anak.

Kemudian pada tahun anggaran 2013, Kabupaten Sumenep mendapat alokasi dana untuk 150 anak, dengan Susunan Tim Pelaksana PPA-PKH Kabupaten Sumenep ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2013 oleh Dirjen Binwas Ketenagakerjaan dengan susunan Pengarah Bapak Sekretaris Daerah, dan Penanggung Jawab Kepala Dinas Nakertran

Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden no 59 tahun 2002 telah mengesahkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang bertujuan “untuk mencegah dan menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak” melalui program tiga tahap selama dua puluh tahun. Dalam lima tahun pertama, tujuan-tujuan utama program tersebut adalah untuk:

1. Meningkatkan kesadaran publik bahwa bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak harus dihapuskan;
2. Memetakan keberadaan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan upaya-upaya untuk menghapuskannya;
3. Mengembangkan dan memulai pelaksanaan program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dengan prioritas pada:
 - a. perdagangan anak untuk eksploitasi seksual;
 - b. pekerjaan penangkapan ikan lepas pantai;
 - c. pekerjaan di tambang-tambang;
 - d. pekerjaan di industri informal pembuatan alas kaki;
 - e. pekerjaan dalam pembuatan dan perdagangan obat bius.

Dalam rangka mewujudkan penghapusan pekerja anak, semua elemen masyarakat harus terlibat termasuk pemangku kebijakan, dinas terkait, organisasi kemasyarakatan, pengusaha, orang tua maupun anak itu sendiri . Oleh karena itu diperlukan perencanaan dalam menyusun kebijakan yang tepat dan efektif agar pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara terarah.

2. Indikator Proses (*process*).

Teknik Rekrutmen Calon Peserta sebagai obyek sasaran program yang telah dialokasikan dananya sebanyak 150 orang anak yang terdiri dari 5 shelter tiap shelter 30 anak. Data yang dijadikan patokan adalah data yang diperoleh dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tahun 2009. Kegiatan home visit pada kantong-kantong by name by adres, dalam rangka memvalidasi karena besar kemungkinan anak pada tahun 2009 putus sekolah sekarang sudah sekolah. Mencocokkan dengan kriteria yang ada, yang pertama adalah nama, benar pekerja anak dari keluarga miskin, kalau tidak tetap dari keluarga itu bisa adiknya kalau belum terentas, merupakan konsekwensi tidak efektif dari sebuah implementasi kebijakan.

Teknik pembinaan adalah setiap peserta PPA-PKH atau penerima manfaat ditampung di 2 (dua) tempat shelter yaitu di Balai Latihan Kerja (BLK) di Jalan Raya Gapura sebanyak 2 (dua) shelter sebanyak 60 anak dan di Hotel Apple 99 sebanyak 3 (tiga) shelter dengan 90 anak. Waktu pelaksanaan mulai tanggal 13 Mei sampai 11 Juni 2013. selama 1 (satu) bulan, dalam memfasilitasi pendampingan pekerja anak.

Adapun instruktur yang membina kegiatan pembelajaran dan pelatihan tidak lepas dari tugas seorang Tutor dan Pendamping.

Peran Seorang Tutor diperlukan untuk melakukan proses belajar-mengajar dan memotivasi serta mempersiapkan anak kembali ke dunia pendidikan, sehari-harinya bersinergi dengan tenaga pendamping untuk melakukan pendampingan selama di shelter.

Tugas pendamping adalah, Melakukan home visit untuk menyiapkan calon penerima manfaat program. Melakukan pendampingan dan memotivasi penerima manfaat selama di shelter dan pasca shelter, hingga penyiapan rekomendasi tentang minat dan kemampuan anak dalam rangka pengembalian ke dunia pendidikan. Melakukan home visit

pasca shelter untuk membimbing penerima manfaat serta memberi pemahaman kepada orang tuanya agar tetap berkomitmen pada pendidikan.

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 74, menjelaskan, Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada bentuk-bentuk pekerjaan yang terburuk. Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak meliputi:

1. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
2. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
3. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
4. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Undang-undang ini menetapkan sanksi bagi para pelanggar hukum. Mereka yang melanggar ketentuan mengenai bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dikenai hukuman penjara selama 2 hingga 5 tahun atau denda sedikitnya 200 juta rupiah atau maksimum 500 juta rupiah. Sedangkan pelanggaran aturan mengenai pekerjaan ringan akan dikenai hukuman penjara selama 1 hingga 4 tahun dan/atau denda sedikitnya 100 juta rupiah dan maksimum 400 juta rupiah.

Pemerintah pusat hendaknya tidak setengah hati dalam implementasi kebijakan ini. Formulasi kebijakan yang telah final ditinjau dari beberapa aspek, ditindak lanjuti dengan upaya menggulirkan program tersebut kepada pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, kabupaten/kota secara menyeluruh, serempak dengan analisa waktu yang sesuai dengan perencanaan awal tahun ajaran pendidikan dan pengajaran berlangsung di semua jenjang pendidikan. Hal ini penting karena Kabupaten/Kota sebagai implementor terdepan dapat merencanakan program lebih teknis yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Sebab bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan dapat diwujudkan. Demikian pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan baik lebih teknis berdasarkan data yang akurat, maka tujuan kebijakan juga tidak akan bisa diwujudkan.

3. Indikator Keluaran (*output*),

Peserta PPA-PKH tahun 2013 yang mengundurkan diri, segera diganti sebab tugas pendampingan diwajibkan setiap 1 (satu) pendamping membawa anak didiknya 10 orang, sehingga mau tidak mau para pendamping harus selalu siap, takut di tengah perjalanan ada lagi anak yang mengundurkan diri.

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus adalah 100 % yaitu peserta yang mengikuti Pembelajaran dengan cara pendampingan di Shelter sebanyak 150 anak. Para peserta penerima manfaat atau pasca Shelter, mereka mendapat rekomendasi untuk melanjutkan sekolah sesuai dengan permintaan anak tersebut; dan ada yang melanjutkan di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan ada yang minta di Pondok Pesantren serta juga ada yang minta dimasukan ke Yayasan Panti Asuhan.

Disinilah keterlibatan pihak-pihak terkait sangat diharapkan perannya. Anak yang telah bertekad untuk melanjutkan sekolahnya, keluar dari kebiasaan bekerja setelah selesai mengikuti pelatihan selama 1 (satu) bulan terbuka lebar harapan masa depan yang lebih cerah. Menyadari akan besarnya cita-cita tanpa adanya dukungan dari pihak-pihak lain, yang siap membantu membuka jalan, terutama kebebasan mereka dari beban biaya yang harus dibayar padahal kita maklum bahwa mereka benar-benar dari keluarga miskin yang hidup pas-pasan hanya sekedar memenuhi kebutuhan pokok belaka. Pupus semuanya, ketika upaya

maksimal pemerintah, masyarakat, orang tua dan anak tidak tindak lanjuti dengan kegiatan nyata oleh para pemegang kekuasaan.

Selama di Shilter anak-anak dapat membuat aneka kerajinan dalam rangka untuk menciptakan kegiatan dan mengajari kedua orangtuanya untuk membuat kerajinan sehingga nantinya peserta anak penerima manfaat dapat membantu orangtuanya jikalau peserta tersebut telah lulus dari SMA; Juga selama di Shilter semula anak yang punya sifat minder dan tidak mau bergaul dengan teman-temannya, akhirnya berubah menjadi pemberani tidak takut dan lincah serta supel dan berinteraktif dengan siapa saja;

Peserta, Orangtua dan Masyarakat sangat mendukung tentang Kegiatan Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) untuk tetap dilanjutkan dan dipertahankan karena kegiatan PPA-PKH sangat membantu jiwa, sifat perilaku anak selama ini banyak hasilnya dan nyata, bahkan ada beberapa tokoh masyarakat kalau perlu kegiatan PPA-PKH dianggarkan dari Dana APBD Kabupaten Sumenep.

Akan tetapi apabila out put dari pengeelolaan pembinaan ini tidak mendapatkan tanggapan serius oleh lembaga pendidikan sebagai user, tidak menempatkan pada posisi prioritas dalam program perencanaan tahun ajaran baru, maka posisi anak penerima manfaat ini akan tersisihkan. Sebab disamping banyaknya calon peserta didik yang memiliki kemampuan lebih dibandingkan dengan karakteristik mereka, juga adanya waktu yang sangat sempit pasca output dengan pendaftaran penerimaan siswa baru.

4. Indikator Dampak (*outcome*),

Pelaksanaan pembinaan prgram PPA-PKH masih baru berakhir tidak lebih dari 3 (tiga) bulan yang lalu. Masa persiapan bagi anak yang baru saja mengikuti pembinaan untuk memasuki jenjang pendidikan baru sangat terbatas. Namun demikian tenaga pendamping pasca shilter, bertugas untuk selalu memantau keberadaan dari 150 anak peserta program PPA-PKH. Petugas Pendampingan diwajibkan melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumenep setiap 3 bulan sekali.

Dari Tim Kementerian Tenaga Kerja RI menugaskan LSM Jarak Bapak Rachmat Taufik yang berdomisili Jl. Kayu Manis III Baru No. 21 Matraman Jakarta Timur 13130 untuk memantau perkembangan kelanjutan anak setelah Pasca Shilter.

Masih ada anak yang menekuni pekerjaan membantu orang tuanya, hal ini dikarenakan memang kondisi orang tuanya betul-betul tidak mampu dari segi ekonomi, namun anak yang bersangkutan tetap meneruskan pendidikan/sekolah.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumenep melaporkan hasilnya kepada Bupati Sumenep untuk mendapatkan perhatian dan demi kelangsungan Pasca Shilter bagi pendidikan anak, khususnya untuk 150 anak peserta pembinaan.

Kemudian Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumenep menyerahkan by name by adres peserta Pasca Shilter atau penerima manfaat kepada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumenep untuk diusulkan mendapatkan program Bantuan Beasiswa Miskin (BSM) dan juga Dinas Sosial Kabupaten Sumenep untuk diusulkan melalui Program yang ada di Dinas Sosial. Hal ini dimaksud adalah dalam rangka mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan. Dimana PPA-PKH ini merupakan salah satu prioritas nasional yang dilaksanakan secara terkoordinasi dengan melibatkan berbagai instansi pemerintah terkait, yakni Kementerian Sosial, Kementian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

Kementerian Agama baik di pusat, provinsi maupun di kabupaten/kota serta nonpemerintah, termasuk lembaga swadaya masyarakat yang terintegrasi dalam program keluarga harapan

Evaluasi jangka panjang kebijakan Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) ini berakhir sampai Tahun 2015 dalam arti masih dievaluasi dan apabila masih bermanfaat dan sangat membantu terutama para kaum miskin maka kemungkinan dapat dilanjutkan/berlanjut.

Peserta terdaftar berdasarkan data dari pusat, yang diharapkan dapat berhasil mengikuti program ini dan berhasil mengentas mereka dari pekerjaan terburuk, kembali melanjutkan sekolahnya, tidak menjadi kenyataan. Sebab kebanyakan mereka benar-benar telah terjun ke dunia kerja membantu pekerjaan orang tuanya yang memang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam sebuah keluarga yang sangat miskin.

Tugas berat yang harus dilakukan para tenaga pendamping untuk mencari sejumlah anak yang memenuhi syarat, untuk menggantikan posisi mereka sejumlah kuota yang telah ditetapkan beberapa waktu sebelum pelaksanaan program dimulai.

Dari sejumlah anak peserta penerima manfaat yang sudah dinyatakan lulus dari program ini, dalam waktu 3 (tiga) bulan ini masih tetap bertahan untuk mengikuti pelajaran di sekolah, sekalipun mereka tetap harus bekerja membantu tugas-tugas orang tua di rumah.

D. KESIMPULAN

Akhir dari pada suatu penelitian yang telah dilakukan dan juga telah tergambarkan hasilnya secara jelas, maka perlu adanya suatu bentuk kesimpulan dari apa yang telah diteliti, dianalisa dan telah dibahas.

Berdasarkan data yang jelas dan rinci dari apa yang telah diteliti, penulis menarik kesimpulan sehingga akan terlihat jelas dari masing masing sub kelemahan dan kekuatan pada evaluasi kebijakan Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) di Kabupaten Sumenep pada tahun 2013.

Saran adalah suatu cara untuk penyempurnaan dari kesimpulan yang kurang berkenan agar apa yang telah dilaksanakan lebih sempurna dan mempunyai arti yang lengkap dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) di Kabupaten Sumenep selanjutnya, sehingga saran ini akan memberikan cara pandang alternatif untuk kemajuan dan peningkatan dalam pelaksanaan pembinaan bagi penerima manfaat dimasa yang akan datang.

Untuk itulah penulis memberikan rincian kesimpulan dan saran dari akhir penelitiannya, sebagai berikut :

1. Indikator masukan (input),

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) Tahun 2013, menjadi dasar pelaksanaan pembinaan PPA – PKH, sekalipun penetapan anak yang dapat mengikuti program ini adalah mereka yang telah didata Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), pada tahun 2009, sehingga harus memvalidasi data yang sudah tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan.

2. Proses (process),

Dalam implemmentasi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung

Program Keluarga Harapan PPA-PKH) telah menunjukkan efektivitas yang baik dalam melaksanakannya, sehingga dapat terselenggara dengan baik, tepat waktu, tepat sasaran, sekalipun pasca pelatihan kesulitan untuk memfasilitasi anak penerima manfaat dalam melanjutkan sekolahnya pada lembaga pendidikan negeri, karena terbatasnya waktu untuk pendaftaran.

3. Keluaran (output),

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus adalah 100 % yaitu peserta yang mengikuti Pembelajaran dengan cara pendampingan di Shilter sebanyak 150 anak. Para peserta penerima manfaat atau pasca Shilter, mereka mendapat rekomendasi untuk melanjutkan sekolah sesuai dengan permintaan anak tersebut; dan ada yang melanjutkan di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan ada yang minta di Pondok Pesantren serta juga ada yang minta dimasukan ke Yayasan Panti Asuhan.

4. Indikator dampak atau (outcome).

Dalam waktu 3 (tiga) bulan pasca shilter, anak penerima manfaat masih rajin bersekolah sekalipun masih ada anak yang menekuni pekerjaan membantu orang tuanya, hal ini dikarenakan memang kondisi orang tuanya betul-betul tidak mampu dari segi ekonomi, namun anak yang bersangkutan tetap meneruskan pendidikan/sekolah.

E. Daftar Pustaka

- Abdul Kadir, Konsep dan Tuntunan Praktis Basis Data*, Andi., Yogyakarta, 2005.
- Arikunto, Suharsimi, *Teknik dan Metode Penelitian*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi, UGM, Yogyakarta. 2004
- Beni Setiawan, *Model-Model Pembelajaran Kreatif*. Tinta Emas Bandung, 2001.
- Farida Yusuf, *Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 2000.
- Istijanto*, Riset Sumber Daya Manusia. PT Gramedia Pustaka Umum Jakarta 2005
- Nanga, Muana. *Makro Ekonomi Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1998,
- Purwanto, Ngalm, *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi*, Balai Pustaka Jkt 2006
- Sudjana, Djudju, *Evaluasi Program*, Rosdakarya, Bandung, 2006
- Sugiyono*, *Metode Penlit Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta Bandung 2010
- Suharto, *Analaisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Alfabeta Bandung. 2009
- Sukirno Sadono. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Fakultas Ekonomi UI Dan Bina Grafika. Jakarta, 2000.
- Tyler, R, *Constructions and Conceptual Change*, Universitas Chicago Press, Chicago. 2003.
- Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik*, Bayu Media Publusing, Malang 2012
- Wirawan. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*, *Pustaka Pelajar Yogkta*, 2010,
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,
- Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN-PBPTA).
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan PPA-PKH) Tahun 2013,